# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memberikan pedoman kepada umat manusia dalam segala aspek kebutuhan hidupnya, dan yang akan menjamin akan mendatangkan kebagian hidup di dunia dan akhirat. Sebagai agama yang telah disempurnakan, agama Islam memberikan pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang aqidah, akhlak dan muamalat.[1]

Manusia adalah mahkluk sosial, yaitu mahkluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai mahkluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lainnya, disadari atau tidak, untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya.[2]

Dalam memenuhi hidupnya manusia tidak terlepas dari mekanisme perdagangan, baik pada aspek produksi, konsumsi maupun distribusi.Perdagangan merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang mengalami tingkat kemajuan yang cukup pesat.Perdagangan dapat terlihat dalam pasar, karena pasar merupakan tempat interaksi antara produsen (penjual) dengan konsumen (pembeli).

---

[1] Ahmad Azhar Bashir, *Garis Besar Sistem Ekonimi Islam*, (Yogyakarta : BPEE UGM, 1987), h. 1

[2] Ahmad Azhar Bashir, *Asas-Asas Muamalat*, (Yogyakarta : UII, 2000), h. 11

Perdagangan merupakan satu bentuk kegiatan muamalat yang sering dijumpai dalam masyarakat. Kegiatan perdagangan sudah diatur dalam al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- orang yang merugikan. (QS. asy-Syura : 181).[3]

Pasar merupakan sebuah aspek yang penting dalam kegiatan perekonomian.Pasar adalah sarana interaksi antara produsen dengan konsumen. Di pasar konsumen akan menentukan barang dan jasa yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga produsen dapat menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi.

Mekanisme pasar adalah kebebasan sepenuhnya oleh pasar tanpa intervensi dari pihak manapun, yaitu terjadi interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu, yang menimbulkan terjadinya sebuah transfer barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.[4]Aspek-aspek mekanisme pasar meliputi komoditi, pelaku pasar, dan harga. Dalam ilmu ekonomi, pelaku pasar dikategorikan menjadi tiga yaitu konsumen yang membentuk permintaan pasar, produsen yang membentuk penawaran pasar, dan pemerintah yang meregulasi harga.[5]

Pembentukan harga suatu barang terjadi dengan adanya interaksi antara dua kekuatan pokok yaitu penawaran oleh penjual (produsen) dan,

---

[3]Departemen Agama RI,*Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : PT. Tiga Serangkai, 2007), h. 374

[4] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 13

[5] Sunaryo, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta : Erlangga, 2001), h. 47

permintaan oleh pembeli (konsumen) dari suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Dalam interaksi akan terjadi tawar menawar sehingga tercapai suatu titik *equilibrium* (keseimbangan) berupa harga yang disepakati oleh para pihak yang berinteraksi. Hasil yang disepakati bersifat mengikat antara keduanya, artinya seorang produsen akan menyerahkan barang yang diminta sebagai konpensasi atas harga yang dibayar atau sebaliknya konsumen harus membayar harga yang disepakati sebagai konpensasi atas barang yang ia beli.[6]

Menurut ekonomi Islam, penentuan harga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran.[7]Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara sukarela. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang berbunyi :

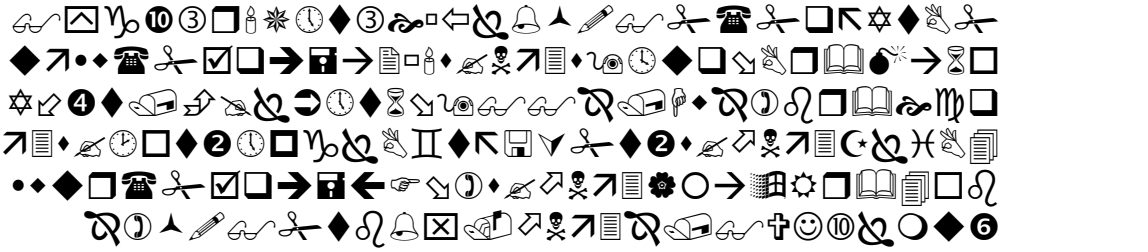

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa': 29).[8]

---

[6] Heri Sudarso, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : EKonosia, 2004), h. 220
[7] Adiwarman A. Karim, *Op.cit*, h. 152
[8]Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 83

Penjelasan pada ayat di atas, memperingatkan agar orang yang mencari kecukupan kebutuhannya dengan jalan yang sah (halal), ditunjukkan pula bahwa diantara jalan yang sah itu adalah yang diperoleh dengan jalan berniaga, dan berniaga yang sah harus dilakukan atas dasar prinsip suka sama suka, tidak ada paksaan, tidak ada pemalsuan dan tidak ada tipu muslihat.[9]

Begitu juga dalam pengendalian harga harus ditentukan oleh penyebabnya, bila penyebabnya perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengandalian dilakukan melalui intervensi pasar, sedangkan bila disebakan oleh *distorsi* (dikarenakan kenaikkan atau penurunan harga ditentukan secara sepihak) terhadap permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan *distorsi*.[10]

Salah satu lembaga pemerintahan yang mengatur dan mengawasi pasar adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.Lembaga tersebut merupakan wakil dari pemerintahan dalam memberikan dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masalah perekonomian. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru akan mengatur dan mengawasi mekanisme pasar yang ada di Kota Pekanbaru. Pada mekanisme pasar, khususnya dalam keterlibatan pemerintah atau intervensi (campur tangan) yang diwakili oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, untuk memantau dan mengawasi pasar. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan intervensi pemerintah dalam pasar dapat dilakukan secara *continue*.

---

[9] Ahmad Azhar Basir, *Op.cit*, h. 4
[10] Heri Sudarsono, *Op.cit*, h. 219-220

Akhir-akhir ini Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan seperti bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus, kabut asap dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan persoalan politik (terungkapnya berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara), masalah ekonomi mahalnya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengakibatnya naiknya harga sembako di setiap daerah khususnya Kota Pekanbaru.

Dalam kasus *fluktuasi* pada harga sembako, terlihat konsumen (pembeli) kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut karena dari hari ke hari harga yang ditawarkan melambung tinggi.Terutama bagi masyarakat yang menengah ke bawah hal seperti ini sangat menyulitkan, ditambah biaya hidup yang konsumtif (mahal).Oleh karena itu pemerintah harus melakukan intervensi untuk menstabilkan harga sembako di pasaran. Menurut keputusan menteri industri dan perdagangan No. 115/mpp/kep/2/1998 tentang macam-macam sembako adalah :

1. Beras, sagu dan jagung
2. Gula pasir
3. Sayar mayur dan buah-buahan
4. Daging sapi dan ayam
5. Minyak goreng dan margarin
6. Susu
7. Telur
8. Minyak tanah dan gas elpiji
9. Garam beriodium dan bernatrium.[11]

[11] Keputusan menteri industri dan perdagangan No. 115/mpp/kep/2/1998 tentang macam-macam sembako

Dalam Islam dinyatakan bahwa tanggungjawab pemerintah bukan terbatas pada soal keamanan semata, tetapi pertanggung jawaban pemerintah harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal, makmur dan adil. Keadilan tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan kepada mereka yang tersangkut masalah perekonomian. Namun yang perlu dipahami bahwa Islam tidak pernah menetapkan harga yang semestinya.

Di Kota Pekanbaru memiliki 6 pasar diantaranya : (Pasar Cik Puan, Pasar Simpang Baru, Pasar Lima Puluh, Pasar Rumbai, Pasar Labuh Baru, dan Pasar Agus Salim).[12]Pasar merupakan sebagai tempat berbelanja masyarakat, masing-masing pasar memiliki konsumen dengan karakteristik tersendiri. Berdasarkan survei awal penulis setiap pasar menetapkan harga yang bervariasi, perbedaan harta untuk sembako berkisar antara 500-1500. Sehingga menarik minat peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang pasar tersebut, kenapa ada perbedaan harga padahal sudah ada lembaga resmi pemerintah yang bertugas mengawasi harga sembako dipasaran, yaitu Disperindag.

Melihat dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah skripsi yang berjudul **Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Sembako Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru).**

## B. Batasan Masalah

[12]http://www.livestockreview.pasar.//pku.com di Akses pada tanggal 21 Januari 2015

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada pemerintahan periode 2011-2015 tentang Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Sembako Ditinjau Menurut Hukum Islam. (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru).

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk intervensi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap harga sembako di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap intervensi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadapharga sembako di Kota Pekanbaru?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk intervensi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap harga sembako di Kota Pekanbaru.
   b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap intervensi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap harga sembako di Kota Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan penulis serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama di perkuliahan.

b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan intervensi pemerintah terhadap harga sembako.

c. Sebagai karya tulis dalam melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan *(Field Research)* yang berlokasi di Kota Pekanbaru.Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena masalah layak diteliti dan belum pernah diteliti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.Sedangkan yang menjadi objeknya adalah intervensi pemerintah terhadap menstabilkan harga sembako di Kota Pekanbaru ditinjau menurut hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Pengertian populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, sedangkan sampel

adalah sejumlah subjek yang dianggap mewakili populasinya.[13]Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 71 orang.[14] Karena sumber data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa orang di bidang terkait, maka diambil sampel 15 % dari populasi yaitu sebanyak 11 orang Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan tehnik *rondam sampling*(Sistem acak).

4. Sumber Data
   a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
   b. Data sekunder, data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu beberapa buku ilmiah yang mendukung penelitian ini.
5. Metode Pengumpulan data
   a. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden.
   b. Studi pustaka, yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.
   c. Studi dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari arsip yang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

---

[13] Hidayat Syah, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru : Fakultas Tarbiyah UIN Suska Riau, 2007), h. 123-124

[14]Http//:www.Arsip-Disperindag-KotaPekanbaru,./. Di akses 09 Desember 2014

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci, berdasarkan kenyataan dilapangan dan mengkaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah, sehingga dapat diambil kesimpulan.[15]

7. Metode Penulisan

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diproleh kemudian dianalisa.
b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
c. Induktif, yaitu, mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

[15] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Salemba Humanika, 2010), h. 154

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, yang menjelaskan gambaran Kota Pekanbaru dan gambaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUN TOERITIS, yang terdiri dari pengertian mekanisme pasar, fungsi pasar dan pasar dalam pandangan Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN, yang terdiri dari bentuk-bentuk intervensi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap harga sembako di Kota Pekanbaru dan tinjauan hukum Islam terhadap intervensi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap harga sembako di Kota Pekanbaru.

BAB V : KESIMPULAN, yang terdiri dari kesimpulan dan Saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**